

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *WORK FROM HOME* STASIUN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) BALI

Seligia Ayu Tantira¹, Nuning Indah Pratiwi²

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

Email Korespondensi: selygia.ayu74@gmail.com

Email: nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id

ABSTRACT

Financial administration during the Work From Home (WHF) policy at Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali has undergone changes, particularly in the recording, verification, and reporting processes, which must be carried out remotely. The Work From Home (WFH) implementation has presented challenges such as limited work equipment, internet disruptions, difficulties in document verification, and differences in employee technology skills. Financial management processes can continue through adjustments such as the use of digital documents, electronic contract signatures, and virtual coordination. Financial administration continues during Work From Home (WHF), but requires strengthening digital systems and improving employee competencies to optimize accountability and work effectiveness.

Keywords: Financial Management, Work From Home, Republic of Indonesia Television Station (TVRI) Bali.

ABSTRAK

Penatausahaan keuangan selama penerapan kebijakan *Work From Home* (WHF) di Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali mengalami perubahan, terutama pada proses pencatatan, verifikasi dan pelaporan yang harus dilakukan secara jarak jauh. Penerapan *Work From Home* (WHF) memunculkan kendala seperti keterbatasan perangkat kerja, gangguan internet, kesulitan memeriksa dokumen, serta perbedaan kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi. Proses pengelolaan keuangan tetap dapat berjalan melalui penyesuaian seperti penggunaan dokumen digital, tanda tangan kontrak elektronik, dan koordinasi virtual. Pelaksanaan penatausahaan keuangan selama *Work From Home* (WHF) tetap berlangsung, namun memerlukan penguatan sistem digital dan peningkatan kompetensi pegawai agar akuntabilitas dan efektivitas kerja dapat lebih optimal.

Kata kunci: Penatausahaan Keuangan, *Work From Home*, Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali.

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital di Indonesia membawa perubahan signifikan pada pola konsumsi media. Masyarakat beralih dari televisi menuju media digital dan media sosial, sehingga lembaga penyiaran publik dituntut mampu beradaptasi dengan cepat. Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai lembaga penyiaran nasional tidak terlepas dari perubahan tersebut. Balqis & Aji menyebutkan bahwa perubahan perilaku audiens mengharuskan lembaga penyiaran meningkatkan kemampuan adaptasi digital agar tetap relevan dalam persaingan media yang semakin kompetitif. Selain itu, media massa tetap memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi karena dipercaya sebagai sumber yang kredibel (Ibrahim & Samsiah, 2022)

Meskipun terjadi penurunan audiens televisi secara nasional. Meskipun terjadi penurunan audiens televisi secara nasional, data Nielsen Television Audience Measurement (TAM) menunjukkan adanya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

202

Indexed



SINTA 5



kenaikan rating televisi dari 12% menjadi 13,8% atau bertambah sekitar 1 juta pemirsa di beberapa kota besar (Yudhaswara & Hidayat, 2021) Kondisi ini menggambarkan bahwa televisi tetap memiliki posisi penting, namun menghadapi tantangan besar terutama bagi Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang sangat bergantung pada dana APBN dan harus tetap memenuhi tuntutan digitalisasi. Karena itu, pengelolaan internal termasuk penatausahaan keuangan menjadi sangat krusial dalam mendukung keberlanjutan operasional lembaga penyiaran publik.

Situasi tersebut semakin kompleks ketika pemerintah menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH). Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali menghadapi tantangan besar untuk memastikan penatausahaan keuangan tetap berjalan tertib, efisien, dan akuntabel meskipun sistem kerja berpindah dari tatap muka menuju kerja jarak jauh *Work From Home* (WFH) meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan verifikasi dokumen, lemahnya pengendalian internal, serta ketimpangan kemampuan digital antarpegawai. Kondisi ini dapat mengganggu ketepatan dan akurasi pelaporan keuangan yang menjadi kewajiban lembaga pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mewajibkan bahwa pengelolaan keuangan tetap memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas meskipun terdapat perubahan sistem kerja (Soeharto, 2022) Permendagri No. 19 Tahun 2016 menegaskan bahwa penatausahaan mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, dan seluruh prosedur tersebut tetap wajib dijalankan dalam kondisi *Work From Home* (WFH). Hal ini menuntut Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali menyesuaikan mekanisme input data keuangan, pengajuan operasional, hingga pelaporan realisasi anggaran secara digital (Sipahutar, Nurlinda, Indahwati, 2025)

Di lapangan, berbagai hambatan muncul dalam pelaksanaan *Work From Home* (WHF). Survei IDN Times menunjukkan produktivitas pegawai lebih tinggi ketika bekerja dari kantor dibanding bekerja dari rumah (Dewi, 2021), sementara survei Databoks menyatakan mayoritas pegawai menilai WFO lebih efektif (Reza, 2022). Pada sektor ASN, 30% aparaturnya mengalami penurunan kompetensi selama *Work From Home* (WHF) (Novalia & Marlina, 2023) Kondisi ini memengaruhi kualitas administrasi penatausahaan, termasuk terjadinya keterlambatan pelaporan dan peningkatan kesalahan rekapitulasi data.

Meski begitu, penelitian Oktaviani, Santoso & Wibowo (2024) menegaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan justru dapat meningkatkan kecepatan pencatatan dan efektivitas pelaporan, walaupun keterbatasan infrastruktur digital tetap menjadi hambatan signifikan Bagi Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali, adaptasi yang dilakukan meliputi penggunaan dokumen digital, tanda tangan elektronik, koordinasi virtual, serta penyesuaian mekanisme pengendalian internal. Pada masa setelah pandemi, Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali bahkan berpeluang mengintegrasikan praktik terbaik tersebut agar proses penatausahaan menjadi lebih efisien.

Dalam mengkaji bagaimana proses penatausahaan keuangan berjalan di tengah implementasi *Work From Home* (WHF), kajian teori menjadi dasar penting. Penatausahaan keuangan dipahami sebagai proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama PP No. 12 Tahun 2019 dan SAP PP No. 71 Tahun 2010. Kegiatan ini mencakup pengelolaan pengeluaran, inventarisasi aset, pelaporan keuangan digital, serta pengendalian internal yang harus diperkuat dalam situasi kerja jarak jauh. Pada aspek implementasi kebijakan, Mazmanian & Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, termasuk peraturan pemerintah dan instruksi eksekutif (Wahab, 2011). *Work From Home* sendiri dipahami sebagai mekanisme kerja jarak jauh berbasis teknologi digital, yang memberikan fleksibilitas namun juga menuntut kesiapan organisasi (Crosbie & Moore, 2004)

Untuk memahami bagaimana kebijakan *Work From Home* (WHF) dijalankan dalam konteks penatausahaan keuangan, kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menyoroti empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur

birokrasi. Komunikasi kebijakan harus jelas, konsisten, dan tersampaikan kepada pelaksana dengan benar (Huda, 2021)

Sumber daya menjadi faktor penting karena kebijakan tidak akan berjalan tanpa dukungan perangkat, infrastruktur digital, serta kompetensi pegawai (Runkat et al., 2016) Disposisi dan sikap pelaksana menentukan tingkat keberhasilan adaptasi selama bekerja dari rumah. Sementara itu, struktur birokrasi menentukan apakah proses penatausahaan dapat dijalankan secara fleksibel atau justru terhambat karena prosedur yang kaku.

METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi di Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali, berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses penatausahaan keuangan selama kebijakan *Work From Home* (WFH). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur dengan Kepala Bagian Keuangan, Ahli Manajemen Keuangan Publik, serta pegawai yang menjalankan *Work From Home* (WHF), dan studi dokumen seperti SOP, laporan keuangan, serta arsip organisasi. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari 5 informan utama dan 4 informan pendukung yang terkait langsung dengan alur keuangan Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik sesuai kaidah validitas penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2023)

PEMBAHASAN

Kebijakan *Work From Home* (WFH) memengaruhi mekanisme kerja keuangan di Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali, antara lain:

1. Penyesuaian pencatatan pengeluaran operasional, misalnya anggaran tambahan untuk pulsa, paket data, dan perangkat kerja selama *Work From Home* (WFH).
2. Perubahan sistem inventarisasi aset, yaitu pencatatan aset digital yang dibawa pegawai ke rumah.
3. Penyusunan laporan keuangan berbasis dokumen digital, alih-alih dokumen kertas, agar dapat diproses jarak jauh.
4. Penguatan pengendalian internal secara virtual, memanfaatkan aplikasi monitoring online untuk memeriksa transaksi.

Implementasi ini sejalan dengan anjuran OJK (2024) yang mendorong lembaga publik menggunakan sistem keuangan terintegrasi guna menjaga efektivitas dan akuntabilitas. Akibatnya, staf keuangan Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali mulai memanfaatkan aplikasi akuntansi online, tanda tangan elektronik, dan sistem penyimpanan awan untuk mempercepat verifikasi dokumen. Misalnya, proses pengajuan anggaran kini dapat diajukan secara daring, dan laporan disusun dalam format spreadsheet terpusat. Transformasi digital ini mempercepat arus informasi keuangan dalam tim, selaras dengan temuan bahwa sistem keuangan digital dapat meningkatkan kecepatan pencatatan transaksi.

Di sisi lain, analisis menunjukkan hambatan teknis cukup signifikan. Beberapa pegawai mengalami keterbatasan perangkat dan koneksi internet tidak stabil selama *Work From Home* (WFH). Hal ini menyebabkan keterlambatan awal dalam pencatatan transaksi harian. Temuan lapangan konsisten dengan survei ASN nasional yang melaporkan penurunan kompetensi serta penundaan pelaporan keuangan di masa *Work From Home* (WFH). Untuk mengatasi kendala tersebut, manajemen Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bal menyelenggarakan pelatihan penggunaan sistem keuangan online dan bertahap meningkatkan infrastruktur TI internal. Hasilnya, kecepatan dan ketepatan pencatatan transaksi kembali membaik setelah beberapa bulan.

Secara keseluruhan, adaptasi ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya dan

fleksibilitas kerja, meskipun menuntut pengawasan ekstra. Penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan digital, misalnya, memungkinkan akuntabilitas laporan dipertahankan tanpa tatap muka. Langkah-langkah ini sejalan dengan asas penatausahaan pemerintah yang menekankan pengelolaan anggaran secara “efisien, transparan, dan akuntabel”. Pengintegrasian sistem teknologi informasi dan peningkatan keterampilan pegawai menjadi kunci keberhasilan penatausahaan keuangan selama *Work From Home* (WFH).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan *Work From Home* (WFH) memaksa Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali menata ulang proses pengelolaan keuangannya menuju sistem digital. Inisiatif seperti e-dokumen, e-signature, dan aplikasi monitoring mampu menjaga kelancaran administrasi keuangan meski pegawai bekerja jarak jauh. Kendala utama yang ditemui adalah keterbatasan infrastruktur TI dan perbedaan kompetensi digital antarpegawai, yang sempat mengganggu kecepatan pelaporan. Penanganan proaktif (pelatihan dan peningkatan teknologi) membantu mengembalikan performa penatausahaan. Secara lebih luas, hasil ini menegaskan pentingnya integrasi teknologi informasi dalam tata kelola keuangan publik, sesuai dengan tujuan SAP pemerintah. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi instansi penyiaran publik dalam memperkuat akuntabilitas keuangan saat menghadapi situasi kerja non-konvensional.

REFERENSI

- Asriani Junaid, Edy Susanto, Muh. Arif, U. K. (2024). Penguatan Penatausahaan Keuangan Daerah Menuju Akuntabel Di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. *Jurnal JP2N*, 1(2), 147–156. <https://doi.org/10.62180/4qt1bg40>
- Anissa, R., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (n.d.). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di LPP TVRI Bali. *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*, 1–7.
- Balqis, N., & Aji, G. G. (2025). Manajemen Produksi Konten Media Sosial Pada Divisi Konten Media Baru TVRI Jawa Timur. *The Commercium*, 9(1), 458–471. <https://doi.org/10.26740/tc.v9i1.66011>
- Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Fauzi, A. R. (2022). Efektivitas Penerapan Kebijakan WFH/WFO di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 61–67.
- Fibriyanti S. Lakoro, & Sukrianto. (2022). Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.253>
- Huda, M. F. (2021). Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George Charles Edward III. 2(4), 1147–1152.
- Ibrahim, I., & Samsiah. (2022). Fungsi Media Massa Bagi Masyarakat di Desa Moibaken (Studi Fungsi dan Media Massa di Masyarakat Desa Moibaken). *Kopi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 4(1), 38–49.
- Kaligis, R. A. W., Sofiyani, N., & Clara, C. (2021). Implementasi Misi Televisi Republik Indonesia: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Kompetisi Media. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 5(1), 64. <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i1.31893>
- Kustiawan, W., Matondang, R. F., Alfina, S., Hibriyanti, H., & Nabila, S. (2022). TVRI TV Station Broadcasting Management. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 1(2), 307–312. <https://doi.org/10.37676/jambd.v1i2.2587>

- Lambe, K. H. P. (2025). Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Melalui Penatausahaan Keuangan yang Efektif di BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 129–136. <https://doi.org/10.1610/xmsmb264>
- Maylanny Christin., & Rico Kurnia Yudhaswara., & Dasrun Hidayat. (2021). Deskripsi Pengalaman Perilaku Selektif Memilih Informasi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Media Massa Televisi Description. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 25(1), 62(2), 61–73.
- Maria Santia Siregar., & Juliana Nasution. (2022). Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Sistem *Work Form Home* (WFH) Masa Pandemi Covid-19 Pada Kanwil Djkn Medan. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 64(3).
- Nuniek Dewi Pramanik. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Produktivitas, Etos Kerja Dan Motivasi Karyawan Selama Bekerja Di Rumah (WFH). *Jurnal EKBIS*, 8(1), 3(8). <https://doi.org/10.56689/ekbis.v9i2.450>
- Rahmat Salam. (2021). Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19. *Journal of Public Administration and Government*, 29(3). <https://doi.org/10.22487/jpag/v3i1.138>
- Raharjo, A., Pane, I. A., Sapitri, J. E., & Mutiah, T. (2021). Analisa Proses Produksi Program Berita Saat Kebijakan *Work Form Home* (WFH). *Jurnal Global Komunika*, 4(1), 21–30.
- Santoso, A. D. R., Lorraine, V., & Ramadhani, P. F. (2021). Manajemen Peliputan Berita oleh Reporter MNC Media di Yogyakarta dalam Pandemi Covid-19. *Jurnal Audiens*, 3(1), 125–140. <https://doi.org/10.18196/jas.v3i1.11888>
- Sipahutar, Nurlinda, I. (2025). Analisis Kualitas Penatausahaan Keuangan, Kepuasan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Keuangan Jurnal Analisis Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1–12.
- Suminar et al., (2021). Iklim Komunikasi *Work From Home* (WFH) Dalam Penyusunan Berita Resmi Statistik.
- Suyaningsih, S., & Sofiati, S. (2022). Evaluasi Penerapan Kebijakan *Work From Home*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 89–102. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.425>
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Sutopo, Ed.; 5th Ed., Vol. 5). ALFABETA. www.cvalfabetacom
- Tia Novalia., & Lina Marlina. (2023). Dampak Kebijakan *Work From Home* Terhadap Kinerja Pegawai Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Eko-Bisma*, 2(2), 212(2), 212–221. <https://doi.org/10.58268/eb.v2i2.63>
- Widuri, N. R. (2020). Studi Implementasi Kebijakan *Work From Home* pada Pustakawan di LIPI. *Media Pustakawan*, 27(3), 168–177. <https://doi.org/10.37014/medpus.v27i3.1017>